

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejaksaan Negeri adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) yang juga meliputi Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi. Salah satu Kejaksaan Negeri di Indonesia yaitu Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat. Kantor Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang saat ini beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan nomor 03, Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.

Melihat kondisi bangunan kantor Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang saat ini dirasa masih kurang optimal untuk digunakan dilihat dari aspek jumlah dan kebutuhan ruangan terhadap jumlah staf saat ini. Melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2024 dan 2025.

Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang yang dalam proses pembangunan saat ini terdiri dari 3 (tiga) lantai yaitu lantai Basement yang difungsikan sebagai area parkir kendaraan dan terdapat beberapa ruangan seperti musholla, sel tahanan, gudang, ruang utilitas. Lantai 1 yang diantaranya difungsikan sebagai lobby, ruang pelayanan, ruang kerja staf dan aula. Sementara dilantai 2 difungsikan untuk ruang Kajari, ruang staf dan Pustaka. Diharapkan hasil dari pembangunan Gedung Kantor Baru ini nantinya dapat bermanfaat bagi pihak Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dapat meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan gedung ini, melibatkan beberapa unsur terkait seperti Tim Teknis Kegiatan dari Dinas PUPR Kota Padang Panjang, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. Target yang ingin dicapai oleh beberapa pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan yaitu

keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan pembangunan ini menjadi salah satu indikator dalam pencapaian kinerja yang baik. Tercapainya keberhasilan pembangunan dari proyek ini juga dipengaruhi oleh bagaimana dan siapa yang mengelolanya. Salah satu unsur krusial untuk mencapai keberhasilan proyek yaitu peran dari Konsultan Pengawas selaku pihak pengawasan konstruksi yang berkontribusi penting dalam mengimplementasikan manajemen proyek mulai dari tahapan pengendalian perencanaan sumber daya, pengendalian teknis, pengendalian komunikasi, pengendalian administrasi kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Konsultan Pengawas proyek merupakan personal atau tim yang harus menjunjung tinggi etika profesi dalam berpraktik dibidang keinsinyuran, termasuk pada pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Perusahaan Konsultan Pengawas pada proyek ini yaitu CV. Restu Graha Cipta yang berasal dari Kota Padang, dimana personil yang ditugaskan dilapangan merupakan orang-orang berpengalaman dan profesional dibidangnya.

Perihal etika profesi ataupun etik keinsinyuran yang diimplementasikan oleh Konsultan Pengawas di Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejalan dengan Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014, dimana terwujudnya penyelenggaraan Keinsinyuran harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan beretika. Dalam implementasi dilapangan Konsultan Pengawas harus bersikap profesional dan berperan dalam menetapkan, menerapkan dan menegakkan kode etik Insinyur, karena seorang profesional yang bergerak dibidang keinsinyuran wajib menyatakan kesanggupan untuk mematuhi kode etik Insinyur dan dijadikan pedoman ataupun landasan tingkah laku setiap Insinyur dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran.

Etika profesi yang diimplementasikan oleh Konsultan Pengawas di Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang mencakup prinsip-prinsip etika seperti integritas, akuntabilitas, keadilan, rasa hormat, jujur, transparan dan profesional. Konsultan Pengawas pada proyek ini juga harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, memastikan perlakuan adil terhadap semua pihak terkait dalam pelaksanaan konstruksi, dan menjaga martabat serta rasa hormat terhadap semua pihak, sehingga tujuan yang

diharapkan dari implementasi etika profesi Konsultan Pengawas di Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang yaitu menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi, menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anggota profesi, meningkatkan pengabdian dan mutu profesi serta meningkatkan mutu organisasi profesi.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja ruang lingkup dari pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang?
2. Bagaimana implementasi etika profesi yang diterapkan oleh Konsultan Pengawas di Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang?

1.3 Tujuan Laporan Teknik

Maksud dari Laporan Teknik ini adalah memaparkan tentang pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Menguraikan ruang lingkup dari pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang;
2. Menjelaskan implementasi etika profesi yang diterapkan oleh Konsultan Pengawas di Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penulisan Laporan Teknik ini diperlukan konsep batasan masalah agar tetap terfokus kepada topik yang dibahas. Adapun batasan masalah yang dimaksud dalam Laporan Teknik ini yaitu sebagai berikut:

1. Proyek yang menjadi objek dalam Laporan Teknik ini yaitu pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang tahun 2024 dan 2025;

2. Dalam Laporan Teknik ini juga akan diuraikan sub mayor item pekerjaan konstruksi sebagai gambaran item pekerjaan yang diawasi oleh Konsultan Pengawas;
3. Etika profesi yang dikaji yaitu etika yang diimplementasi oleh setiap personil dari Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Laporan Teknik ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan akan dibahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan laporan teknik, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka menjelaskan studi literatur yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas dalam Laporan Teknik.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab Metodologi penelitian berisikan objek studi, teknik pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV : Analisa dan Pembahasan

Analisis dan pembahasan yaitu uraian dan penjelasan untuk menjawab tujuan dari laporan teknik.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Memuat rangkuman dari pembahasan laporan teknik serta saran yang didasarkan pada hasil laporan.